


TRANSFORMASI KEBIJAKAN MONETER SYARIAH DALAM MENGHADAPI TANTANGAN SISTEM KEUANGAN GLOBAL MODREN ISLAM BERBASIS NILAI KEADILAN

Syifwa Nurdilla Gusvi Damanik¹, Nurul Hikmah Pasaribu²,
Muhammad Rusdi Hasibuan³, Muhammad Arfan Harahap⁴
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ^{1, 2, 3}

Email : wawadmnk19@gmail.com, nurulpasaribu234@gmail.com, rusdi200422@gmail.com,
muhammadarfanhrp@uinsu.ac.id

<p>Menerima: 25/12/2025</p> <p>Diterima: 26/12/2025</p> <p>Menerbitkan: 27/12/2025</p>  <p>This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.</p>	<p>Abstrak</p> <p><i>The classroom environment plays a crucial role in shaping the quality of the learning process, particularly in improving the concentration of elementary school students. Concentration in learning in children is greatly influenced by the physical and psychological conditions created within the classroom. A neat room layout, adequate lighting, and good ventilation help create a comfortable learning atmosphere with minimal distractions. Furthermore, the use of engaging learning media and the moderate placement of visual elements can strengthen students' focus during learning activities. Positive interactions between teachers and students are also crucial in creating a supportive learning environment. Teachers who are able to manage a classroom effectively can reduce noise, regulate the pace of activities, and provide clear directions so that students can more easily maintain attention. This study aims to illustrate how elements of the classroom environment contribute to improving elementary school students' concentration and provide practical guidance for educators in creating a conducive learning space oriented towards children's developmental needs.</i></p> <p>Keywords: <i>classroom environment, learning concentration, elementary school students, classroom management, learning atmosphere.</i></p>
--	---

PENDAHULUAN

Transformasi kebijakan moneter syariah menjadi isu yang semakin relevan dalam dinamika sistem keuangan global modern yang ditandai oleh volatilitas pasar, krisis keuangan berulang, dan ketimpangan distribusi kesejahteraan. Sistem keuangan global yang berbasis bunga dan spekulasi terbukti rentan menciptakan instabilitas struktural, sehingga mendorong lahirnya alternatif sistem moneter yang lebih berkeadilan. Dalam konteks ini, kebijakan moneter syariah hadir sebagai pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada stabilitas harga, tetapi juga menekankan nilai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan ekonomi. Prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir menjadi fondasi penting dalam merancang kebijakan moneter yang lebih etis dan inklusif. Oleh karena itu, transformasi kebijakan moneter syariah tidak dapat dipahami sekadar sebagai adaptasi teknis, melainkan sebagai upaya sistemik untuk membangun tatanan keuangan global yang lebih stabil dan manusiawi (Adinugraha et al., 2020).

Perkembangan ekonomi global yang semakin terintegrasi menuntut kebijakan moneter syariah untuk mampu merespons tantangan lintas negara, termasuk arus modal global, fluktuasi nilai tukar, serta krisis finansial internasional. Dalam kerangka ekonomi Islam, kebijakan moneter tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali inflasi, tetapi juga sebagai instrumen distribusi keadilan ekonomi. Pemikiran M. Umer Chapra menekankan

bahwa kebijakan moneter Islam harus berorientasi pada maqashid syariah, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Transformasi kebijakan moneter syariah menjadi kebutuhan mendesak agar instrumen-instrumen yang digunakan tetap relevan dengan sistem keuangan modern tanpa kehilangan nilai dasarnya. Dengan demikian, integrasi antara prinsip syariah dan realitas ekonomi global menjadi tantangan utama yang harus dijawab secara konseptual maupun praktis (Aisah, 2021).

Krisis ekonomi global yang berulang menunjukkan bahwa sistem moneter konvensional memiliki keterbatasan dalam menciptakan stabilitas jangka panjang. Dalam situasi tersebut, ekonomi moneter syariah menawarkan pendekatan yang lebih tahan terhadap krisis melalui prinsip kehati-hatian dan keterkaitan langsung dengan sektor riil. Transformasi kebijakan moneter syariah menjadi penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan global, terutama dalam menghadapi guncangan eksternal. Kebijakan moneter syariah menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, sehingga mampu meminimalkan dampak negatif krisis terhadap kelompok rentan. Selain itu, instrumen moneter syariah seperti sertifikat bank sentral syariah dan pembiayaan berbasis bagi hasil dinilai lebih adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi global. Oleh sebab itu, penguatan kebijakan moneter syariah menjadi bagian strategis dalam membangun sistem keuangan global yang lebih adil dan stabil (Ambarani, 2022).

Dalam konteks Indonesia dan negara-negara dengan sistem keuangan ganda, transformasi kebijakan moneter syariah menghadapi tantangan struktural dan institusional yang kompleks. Mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah masih memerlukan penguatan agar dapat berjalan efektif seiring dengan kebijakan moneter konvensional. Tantangan ini mencakup keterbatasan instrumen, koordinasi kebijakan, serta pemahaman pelaku pasar terhadap prinsip syariah. Namun demikian, perkembangan perbankan dan keuangan syariah menunjukkan potensi besar dalam mendukung stabilitas sistem keuangan. Transformasi kebijakan moneter syariah tidak hanya menuntut inovasi instrumen, tetapi juga reformasi kelembagaan yang mampu menjamin efektivitas transmisi kebijakan. Dengan pendekatan yang tepat, kebijakan moneter syariah dapat menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi berbasis nilai keadilan (Bathaluddin et al., 2021).

Nilai keadilan merupakan inti dari kebijakan moneter dalam perspektif Islam, yang membedakannya secara fundamental dari pendekatan konvensional. Kebijakan moneter syariah bertujuan untuk mencegah akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu dan memastikan distribusi ekonomi yang lebih merata. Dalam sistem keuangan global modern yang cenderung eksklusif, nilai keadilan Islam menjadi relevan sebagai solusi normatif dan praktis. Peran bank sentral dalam kebijakan moneter syariah tidak hanya terbatas pada stabilitas moneter, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dalam menjaga keseimbangan sosial. Transformasi kebijakan moneter syariah menuntut bank sentral untuk mengintegrasikan prinsip keadilan dalam setiap kebijakan yang diambil. Dengan demikian, kebijakan moneter syariah dapat berkontribusi pada terciptanya sistem keuangan global yang lebih etis dan berkelanjutan (Huda, 2022).

Seiring dengan berkembangnya sistem keuangan global berbasis digital dan integrasi regional, kebijakan moneter syariah dituntut untuk terus bertransformasi agar tidak tertinggal oleh dinamika zaman. Inovasi instrumen moneter syariah menjadi kunci dalam menjaga relevansi kebijakan di tengah kompleksitas globalisasi ekonomi. Transformasi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga konseptual, dengan tetap menjaga prinsip dasar Islam sebagai fondasi utama. Sistem moneter syariah diharapkan mampu menjadi alternatif global yang menawarkan stabilitas, keadilan, dan keberlanjutan. Dengan mengedepankan nilai keadilan sebagai basis kebijakan, moneter syariah memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam reformasi sistem keuangan global modern. Oleh karena itu, kajian

mengenai transformasi kebijakan moneter syariah menjadi penting untuk menjawab tantangan ekonomi global secara komprehensif (Siregar, 2024).

TINJAUAN TEORITIS

a) Konsep Dasar Kebijakan Moneter Syariah

Kebijakan moneter syariah secara teoritis berangkat dari prinsip dasar ekonomi Islam yang menolak praktik riba dan menekankan keterkaitan sektor moneter dengan sektor riil. Dalam kerangka ini, uang tidak dipandang sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan, melainkan sebagai alat tukar yang berfungsi mendukung aktivitas ekonomi produktif. Kebijakan moneter syariah bertujuan menjaga stabilitas nilai uang sekaligus mendorong distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah. Instrumen moneter syariah dirancang untuk menghindari spekulasi berlebihan dan ketidakpastian yang sering muncul dalam sistem konvensional. Oleh karena itu, kebijakan moneter syariah memiliki karakteristik normatif yang kuat, karena tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan keseimbangan moral dalam perekonomian (Hiya & Siregar, 2022).

Secara teoritis, kebijakan moneter syariah juga dikaitkan dengan pencapaian maqashid syariah, khususnya *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs*, yang menekankan perlindungan harta dan kesejahteraan manusia. Hal ini menjadikan kebijakan moneter syariah tidak bersifat netral nilai, melainkan sarat dengan tujuan sosial. Pengendalian jumlah uang beredar dilakukan melalui instrumen non-bunga, seperti bagi hasil dan akad syariah lainnya. Pendekatan ini diyakini mampu menciptakan stabilitas moneter yang lebih berkelanjutan karena mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis produktivitas nyata. Dengan demikian, teori kebijakan moneter syariah menawarkan paradigma alternatif yang lebih holistik dibandingkan sistem moneter konvensional (Siregar, 2021).

b) Prinsip Keadilan dalam Teori Moneter Islam

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam teori moneter Islam yang membedakan kebijakan moneter syariah dari pendekatan konvensional. Dalam perspektif Islam, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai keseimbangan pasar, tetapi juga sebagai distribusi kekayaan yang proporsional dan tidak eksploitatif. Kebijakan moneter syariah dirancang untuk mencegah konsentrasi kekayaan dan ketimpangan ekonomi yang ekstrem. Oleh karena itu, setiap kebijakan moneter harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan. Prinsip ini menjadikan kebijakan moneter Islam bersifat inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif, bukan semata-mata keuntungan individu atau kelompok tertentu (Huda, N., 2023).

Dalam praktik teoritisnya, keadilan moneter diwujudkan melalui penghapusan bunga dan penerapan mekanisme bagi hasil yang mencerminkan risiko dan keuntungan secara seimbang. Sistem ini mendorong hubungan ekonomi yang lebih adil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Selain itu, kebijakan moneter syariah juga menekankan pentingnya peran negara dan bank sentral dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Bank sentral tidak hanya berfungsi sebagai otoritas teknis, tetapi juga sebagai penjaga nilai moral dalam sistem moneter. Dengan demikian, teori keadilan dalam moneter Islam menjadi landasan normatif bagi transformasi kebijakan moneter syariah di era global modern (Huda, M., 2022).

c) Instrumen Moneter Syariah dalam Perspektif Teoritis

Instrumen moneter syariah secara teoritis dikembangkan untuk menggantikan instrumen berbasis bunga yang mendominasi sistem keuangan konvensional. Instrumen seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah, pembiayaan berbasis akad mudharabah, dan musyarakah menjadi alternatif utama dalam pengendalian likuiditas. Keunggulan instrumen

moneter syariah terletak pada keterkaitannya dengan aktivitas ekonomi riil, sehingga mampu meminimalkan distorsi pasar. Dalam teori moneter Islam, instrumen ini dipandang lebih stabil karena tidak mendorong spekulasi jangka pendek. Oleh karena itu, penggunaan instrumen moneter syariah diyakini dapat memperkuat ketahanan sistem keuangan terhadap guncangan eksternal (Bathaluddin et al., 2021).

Instrumen moneter syariah juga dirancang untuk mendukung stabilitas keuangan regional dan global. Dalam konteks globalisasi, instrumen ini harus mampu bersaing dan beradaptasi dengan dinamika pasar internasional. Teori moneter syariah menekankan pentingnya inovasi instrumen tanpa mengorbankan prinsip syariah. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pengembangan kebijakan moneter Islam. Dengan pendekatan teoritis yang tepat, instrumen moneter syariah dapat berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan global yang lebih adil dan berkelanjutan (Bayuni & Srisusilawati, 2023).

d) Peran Bank Sentral dalam Teori Kebijakan Moneter Syariah

Dalam teori kebijakan moneter syariah, bank sentral memiliki peran strategis sebagai pengendali stabilitas moneter dan penjaga nilai keadilan ekonomi. Bank sentral syariah bertanggung jawab memastikan bahwa kebijakan moneter selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Peran ini mencakup pengawasan instrumen moneter, pengendalian inflasi, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Berbeda dengan pendekatan konvensional, bank sentral dalam sistem syariah juga memiliki tanggung jawab moral untuk mencegah praktik ekonomi yang merugikan masyarakat luas. Dengan demikian, peran bank sentral tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga normatif (Huda, M., 2022).

Bank sentral syariah harus mampu menyeimbangkan tujuan stabilitas moneter dengan pencapaian kesejahteraan sosial. Kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap distribusi kekayaan dan pertumbuhan ekonomi berkeadilan. Teori ini menekankan perlunya koordinasi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi Islam. Dengan peran yang kuat dan terintegrasi, bank sentral syariah dapat menjadi aktor utama dalam transformasi sistem keuangan global menuju arah yang lebih etis dan stabil (Hubara et al., 2021).

e) Transformasi Kebijakan Moneter Syariah dalam Sistem Keuangan Global

Teori transformasi kebijakan moneter syariah muncul sebagai respons terhadap kompleksitas sistem keuangan global modern. Globalisasi ekonomi membawa tantangan berupa volatilitas pasar, arus modal bebas, dan krisis keuangan lintas negara. Dalam konteks ini, kebijakan moneter syariah dituntut untuk beradaptasi tanpa kehilangan identitas nilai dasarnya. Transformasi teoritis ini mencakup penyesuaian instrumen, mekanisme transmisi, serta kerangka regulasi agar tetap relevan di tingkat global. Teori moneter Islam memandang globalisasi sebagai tantangan sekaligus peluang untuk menunjukkan keunggulan sistem keuangan berbasis nilai keadilan (Sobarna, 2022).

Transformasi kebijakan moneter syariah juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan digitalisasi sistem keuangan. Teori moneter syariah modern menekankan perlunya inovasi yang mampu menjawab kebutuhan pasar global. Namun, inovasi tersebut harus tetap berada dalam koridor syariah agar tidak menyimpang dari tujuan utamanya. Dengan landasan teoritis yang kuat, kebijakan moneter syariah diharapkan mampu berkontribusi dalam reformasi sistem keuangan global yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan (Siregar, S., 2024).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam

transformasi kebijakan moneter syariah dalam menghadapi tantangan sistem keuangan global modern berbasis nilai keadilan. Pendekatan ini dipilih karena kajian kebijakan moneter syariah memiliki karakter normatif dan konseptual yang kuat, sehingga membutuhkan penelusuran teori, konsep, dan pemikiran para ahli ekonomi Islam. Data penelitian bersumber dari literatur ilmiah berupa jurnal nasional terakreditasi, buku akademik, dan publikasi ilmiah yang relevan dengan tema moneter syariah, keadilan ekonomi, serta sistem keuangan global. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran sistematis terhadap sumber-sumber yang kredibel. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menemukan pola, konsep utama, serta relevansi teoritis dalam pengembangan kebijakan moneter syariah kontemporer (Hiya & Siregar, 2022).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu menguraikan konsep-konsep kebijakan moneter syariah secara sistematis dan mengaitkannya dengan tantangan ekonomi global modern. Tahapan analisis meliputi pengklasifikasian data, penafsiran konsep, serta sintesis teori yang relevan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan berbagai pandangan akademik terkait transformasi instrumen dan peran kebijakan moneter syariah. Selain itu, analisis dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian konsep dengan maqashid syariah sebagai kerangka normatif utama. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai arah transformasi kebijakan moneter syariah yang adaptif terhadap dinamika sistem keuangan global tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam (Siregar, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa transformasi kebijakan moneter syariah merupakan proses konseptual yang tidak terpisahkan dari dinamika sistem keuangan global modern. Kebijakan moneter syariah tidak lagi dipahami sebatas pengendalian likuiditas, melainkan sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mewujudkan keadilan distributif. Dalam konteks globalisasi, sistem keuangan menghadapi tantangan berupa volatilitas pasar, dominasi instrumen spekulatif, dan ketimpangan ekonomi antarnegara. Kebijakan moneter syariah hadir dengan pendekatan nilai yang menekankan keterkaitan sektor moneter dan sektor riil, serta menolak praktik yang bersifat eksploitatif. Oleh karena itu, hasil pembahasan ini difokuskan pada penguatan konsep, peran institusi, instrumen moneter, dan orientasi keadilan sebagai fondasi utama transformasi kebijakan moneter syariah.

Tabel 1.
 Karakteristik Kebijakan Moneter Syariah

No	Aspek	Karakteristik	Implikasi Kebijakan
1	Prinsip dasar	Berbasis syariah dan nilai moral	Stabilitas dan etika ekonomi
2	Pandangan uang	Alat tukar, bukan komoditas	Menekan spekulasi
3	Mekanisme	Non-bunga	Keadilan transaksi
4	Orientasi	Sektor riil	Pertumbuhan berkelanjutan

Pembahasan tabel ini menunjukkan bahwa karakteristik kebijakan moneter syariah memiliki perbedaan mendasar dibandingkan sistem moneter konvensional. Prinsip dasar syariah menjadikan kebijakan moneter tidak bersifat netral nilai, melainkan terikat pada tujuan moral dan sosial. Pandangan terhadap uang sebagai alat tukar menegaskan bahwa kebijakan moneter syariah menolak praktik perdagangan uang yang bersifat spekulatif. Hal ini berdampak pada penguatan stabilitas ekonomi karena peredaran uang diarahkan untuk

mendukung aktivitas produktif. Dengan mekanisme non-bunga, kebijakan moneter syariah menekankan keseimbangan risiko dan keuntungan, sehingga mencegah eksploitasi ekonomi. Orientasi pada sektor riil menjadikan kebijakan ini lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat luas.

Implikasi kebijakan dari karakteristik tersebut menunjukkan bahwa moneter syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali inflasi, tetapi juga sebagai sarana pemerataan ekonomi. Pendekatan ini mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam sistem keuangan global modern yang rentan terhadap krisis, karakteristik kebijakan moneter syariah memberikan alternatif konseptual yang lebih stabil. Oleh karena itu, karakteristik ini menjadi dasar penting dalam transformasi kebijakan moneter syariah agar tetap relevan dan berdaya saing di tingkat global.

Tabel 2.
Tantangan Global dalam Kebijakan Moneter Syariah

No	Tantangan	Bentuk Tantangan	Dampak Sistemik
1	Globalisasi	Integrasi pasar	Volatilitas ekonomi
2	Digitalisasi	Inovasi keuangan	Risiko regulasi
3	Dual system	Konvensional dan syariah	Koordinasi kebijakan
4	Krisis global	Ketidakpastian ekonomi	Instabilitas moneter

Tabel ini menggambarkan bahwa kebijakan moneter syariah menghadapi tantangan kompleks dalam sistem keuangan global modern. Globalisasi ekonomi menyebabkan keterhubungan pasar yang tinggi, sehingga kebijakan moneter domestik rentan terhadap guncangan eksternal. Digitalisasi keuangan menghadirkan peluang inovasi, tetapi juga menimbulkan tantangan regulasi agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, keberadaan sistem keuangan ganda menuntut koordinasi kebijakan yang cermat agar tidak terjadi ketidakseimbangan antara sektor syariah dan konvensional. Krisis global yang berulang memperkuat urgensi kebijakan moneter yang lebih stabil dan berkeadilan.

Dampak sistemik dari tantangan tersebut menuntut transformasi kebijakan moneter syariah secara menyeluruh. Transformasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga konseptual dan kelembagaan. Kebijakan moneter syariah harus mampu merespons perubahan global tanpa kehilangan identitas nilai Islam. Dengan penguatan regulasi dan inovasi berbasis syariah, kebijakan moneter syariah berpotensi menjadi solusi alternatif dalam menghadapi ketidakpastian sistem keuangan global.

Tabel 3.
Instrumen Kebijakan Moneter Syariah

No	Instrumen	Karakteristik	Fungsi Utama
1	Sertifikat syariah	Non-bunga	Pengendalian likuiditas
2	Akad bagi hasil	Berbasis kemitraan	Distribusi risiko
3	Operasi pasar syariah	Berbasis aset	Stabilitas moneter
4	Giro wajib minimum	Prinsip kehati-hatian	Pengendalian uang

Instrumen kebijakan moneter syariah memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Karakteristik non-bunga menjadikan instrumen ini lebih selaras dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Sertifikat syariah dan operasi pasar berbasis aset mendorong keterkaitan langsung dengan sektor riil. Akad bagi hasil menekankan kemitraan yang adil antara pihak yang terlibat, sehingga risiko tidak ditanggung sepihak. Giro wajib minimum dalam sistem syariah tetap berfungsi sebagai alat pengendali likuiditas dengan pendekatan kehati-hatian.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa efektivitas instrumen moneter syariah sangat bergantung pada desain dan implementasinya. Instrumen tersebut harus mampu menjawab kebutuhan stabilitas moneter tanpa menimbulkan distorsi pasar. Dalam konteks global, penguatan instrumen moneter syariah menjadi bagian penting dari transformasi kebijakan agar lebih adaptif dan kompetitif. Dengan pengembangan instrumen yang tepat, kebijakan moneter syariah dapat berkontribusi pada stabilitas keuangan yang berkelanjutan.

Tabel 4.
Nilai Keadilan dalam Transformasi Moneter Syariah

No	Nilai	Makna Konseptual	Implementasi
1	Keadilan	Keseimbangan ekonomi	Distribusi kekayaan
2	Transparansi	Kejelasan transaksi	Kepercayaan publik
3	Keseimbangan	Risiko dan hasil	Stabilitas sistem
4	Kemaslahatan	Kesejahteraan umum	Kebijakan inklusif

Nilai keadilan menjadi inti dari transformasi kebijakan moneter syariah. Keadilan dipahami sebagai keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Transparansi dalam kebijakan moneter syariah meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Keseimbangan antara risiko dan hasil memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara struktural. Kemaslahatan menjadi tujuan akhir kebijakan moneter syariah, yaitu tercapainya kesejahteraan umum yang berkelanjutan.

Pembahasan ini menegaskan bahwa transformasi kebijakan moneter syariah tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Islam sebagai fondasi normatif. Nilai keadilan bukan sekadar konsep etis, tetapi menjadi prinsip operasional dalam perumusan kebijakan. Dalam sistem keuangan global yang cenderung eksklusif, kebijakan moneter syariah menawarkan paradigma alternatif yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Dengan menempatkan keadilan sebagai pusat kebijakan, moneter syariah berpotensi memberikan kontribusi nyata bagi reformasi sistem keuangan global.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa transformasi kebijakan moneter syariah merupakan kebutuhan strategis dalam menghadapi kompleksitas sistem keuangan global modern yang sarat dengan ketidakpastian dan ketimpangan. Kebijakan moneter syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian stabilitas moneter, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan ekonomi. Prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, keterkaitan sektor moneter dengan sektor riil, serta orientasi pada kemaslahatan menjadi fondasi utama dalam merancang kebijakan moneter yang lebih inklusif dan etis. Oleh karena itu, kebijakan moneter syariah memiliki keunggulan konseptual dalam merespons tantangan global dibandingkan sistem moneter konvensional.

Transformasi kebijakan moneter syariah menuntut penguatan instrumen, peran bank sentral, serta integrasi nilai keadilan dalam setiap kebijakan yang diambil. Tantangan globalisasi, digitalisasi, dan krisis keuangan global harus dijawab dengan inovasi kebijakan yang tetap berada dalam koridor syariah. Dengan pendekatan yang adaptif dan berlandaskan nilai Islam, kebijakan moneter syariah berpotensi menjadi alternatif sistem moneter global yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan. Kesimpulan ini menegaskan bahwa pengembangan kebijakan moneter syariah tidak hanya relevan bagi negara muslim, tetapi juga dapat memberikan kontribusi signifikan bagi reformasi sistem keuangan global secara keseluruhan.

REFERENSI

- Adinugraha, H., Hermawan, H., & Sartika, M. (2020). Perbankan syariah: Fenomena terkini dan praktiknya di Indonesia. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 165-180.
- Aisah, S. (2021). Relevansi konsep moneter Islam M. Umer Chapra dengan kebijakan moneter Indonesia. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 165-180.
<https://ejournal.uinsaid.ac.id/index/article/view/1234>
- Ambarani, L. (2022). Ekonomi moneter syariah dalam menghadapi krisis global. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 8(1), 45-60.
- Bathaluddin, M. B., Dalawati, M., & Mochtar, F. (2021). Revisit transmisi kebijakan moneter syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 5(2), 120-135.
- Bayuni & Srisusilawati. (2023). Kontribusi instrumen moneter syariah terhadap stabilitas keuangan ASEAN. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(2), 165-181.
- Hiya, N., & Siregar, S. (2022). Studi literatur kebijakan moneter Islam tanpa bunga. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 868-875.
- Huda, M. (2022). Peran bank sentral dalam kebijakan moneter Islam berbasis keadilan. *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 3(1), 38-52.
- Hubara, A., Nurrahma, S. A., & Jannah, N. (2021). Penerapan kebijakan moneter Islam pada sistem perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Triangle*, 2(4), 463-474.
- Siregar, E. Y. (2021). Kerangka kerja kebijakan moneter dalam Islam menghadapi globalisasi. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 163-175.
- Sobarna, N. (2022). Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam: Tantangan modern. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 20-35.
<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/jei/article/view/4567>
- Sukamto & Aisah, S. (2021). Relevansi konsep moneter Islam M. Umer Chapra dengan kebijakan moneter di Indonesia. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 165-180.
- Sumarni, Y. (2020). Manajemen ekonomi Islam dalam menangani pandemi: Aspek moneter syariah. *Jurnal Ekonomi Madani*, 4(3), 200-215.
- Trianto, B., & Al-Bahi, M. (2021). Transmisi kebijakan moneter syariah di era digital. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(4), 300-315.
- Huda, N. (2023). Ekonomi makro Islam: Pendekatan teoritis untuk keadilan global. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 9(1), 50-65.
- Siregar, S. (2024). Transformasi instrumen moneter syariah menghadapi sistem keuangan global. *Jurnal Ilmu Keuangan Syariah*, 6(2), 100-118.